

BAB V

PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2010—2014

5.1 Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini

5.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2004—2008 cenderung terus meningkat. Secara rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,7 persen dan Sulawesi Tenggara sebesar 7,6 persen, sedangkan pertumbuhan terendah di Sulawesi Selatan sebesar 5,3 persen. Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda juga mampu bertumbuh konsisten dalam periode 2006—2008 pada tingkat pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi 7,7 persen (**Tabel 5.1**).

TABEL 5.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2004 - 2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

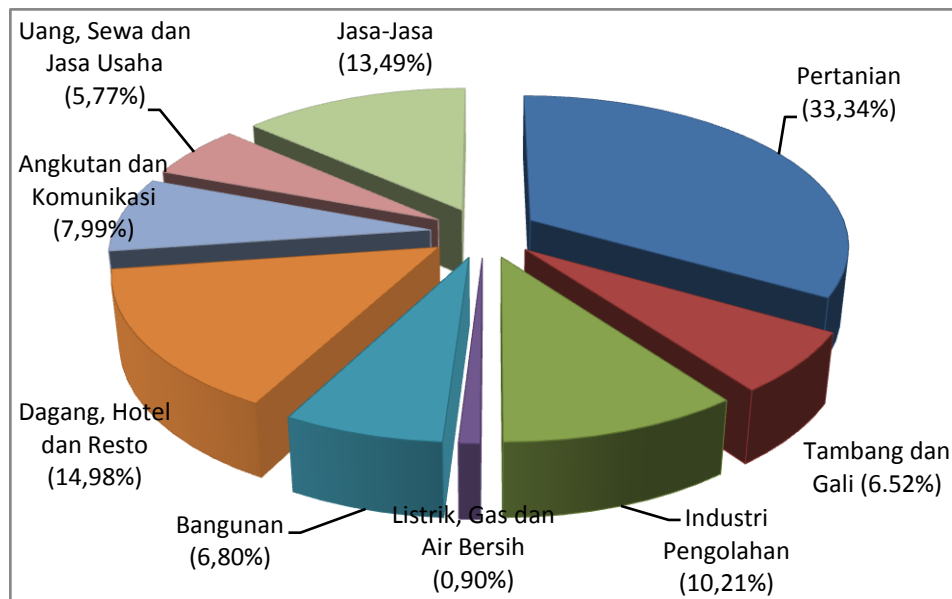
Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Sulawesi Utara	4,3	4,9	5,7	6,5	8,1
Gorontalo	6,9	7,2	7,3	7,5	7,9
Sulawesi Tengah	7,1	7,6	7,8	8,0	7,9
Sulawesi Selatan	-3,0	15,1	6,7	6,3	7,7
Sulawesi Tenggara	7,5	7,3	7,7	8,0	7,3
Sulawesi Barat	-	-	7,0	7,4	8,6

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada triwulan 1 tahun 2008 perekonomian wilayah Sulawesi didominasi sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 33,34 persen dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). Selain sektor pertanian, perekonomian wilayah Sulawesi juga didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Tingginya peran sektor pertanian bagi perekonomian wilayah juga menggambarkan

peran strategis wilayah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan belum berkembangnya industri pengolahan yang berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan wilayah.

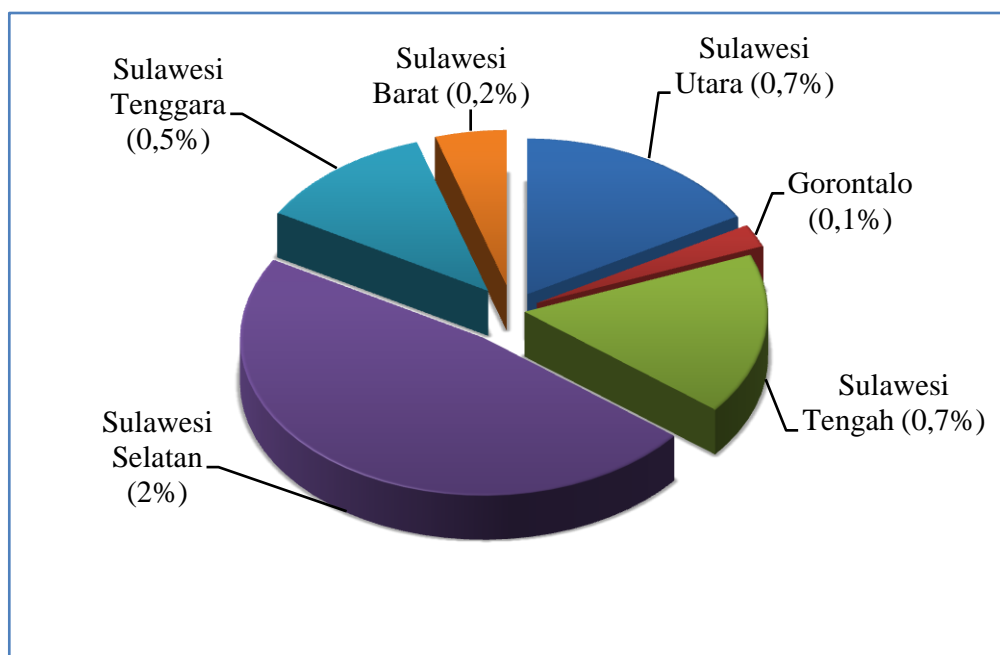
GAMBAR 5.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SULAWESI MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, peran wilayah Sulawesi dalam pembentukan total PDRB pada tahun 2008 sebesar 4,2 persen. Dibanding provinsi lain, Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional, yaitu sebesar 2 persen. Sementara itu, kontribusi provinsi lain di wilayah Sulawesi umumnya kurang dari 1 persen. Besarnya peran Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan peran strategis provinsi ini sebagai pusat pertumbuhan wilayah termasuk kawasan timur Indonesia (**Gambar 5.2**).

GAMBAR 5.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SULAWESI TERHADAP EKONOMI NASIONAL
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Produk unggulan wilayah Sulawesi berupa komoditas primer yang juga menjadi andalan ekspor nasional. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pusat penghasil padi dengan peran 63 persen dari total produksi wilayah dan 10,3 persen produksi nasional. Di samping itu, Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah juga merupakan sentra produksi kakao yang memasok sekitar 71 persen dari produk nasional. Sementara itu, Provinsi Gorontalo fokus pada produksi jagung. Hampir 50 persen produksi jagung wilayah Sulawesi berasal dari Provinsi Gorontalo, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Teluk Tomini merupakan penghasil ikan dengan tingkat produksi mencapai hampir 47 persen dari total produksi wilayah. Komoditas perikanan yang memegang peranan penting dalam pendapatan ekspor di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain ikan tongkol, kerapu, tuna, udang, rumput laut, teripang, dan mutiara. Potensi lainnya yang bisa dikembangkan sebagai sektor unggulan adalah wisata bahari taman laut dan wisata budaya.

Kegiatan investasi di wilayah Sulawesi masih didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan perkembangan yang fluktuatif. PMDN wilayah Sulawesi pada tahun 2004 sebesar 1,07 persen dari total PMDN nasional dan pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 5,63 persen terhadap total PMDN nasional. Penanaman

modal asing (PMA) di wilayah Sulawesi cenderung kecil. Kontribusi PMA di wilayah Sulawesi adalah sebesar 0,60 persen terhadap total PMA secara nasional pada tahun 2004 dan sebesar 0,44 persen terhadap total PMA secara nasional pada tahun 2008.

Produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita wilayah Sulawesi terus mengalami peningkatan dengan tingkat ketimpangan antarprovinsi relatif kecil. Gambaran mengenai PDRB perkapita dengan migas atas dasar harga konstan di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.2.

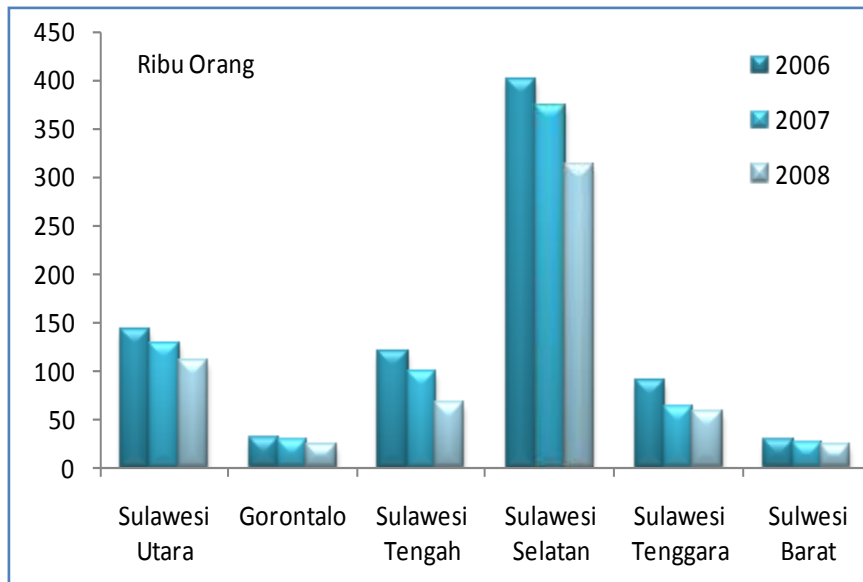
TABEL 5.2
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000
(DALAM RIBU RUPIAH)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Sulawesi Utara	5,628	5,945	6,222	6,559	6,988
Sulawesi Tengah	4,850	5,083	5,383	5,711	6,057
Sulawesi Selatan	4,642	4,863	5,118	5,368	5,708
Sulawesi Tenggara	3,890	4,126	4,347	4,594	4,824
Gorontalo	2,108	2,166	2,294	2,436	2,593
Sulawesi Barat	-	3,152	3,317	3,509	3,751

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi. Namun, persentase pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat memiliki jumlah dan tingkat pengangguran paling rendah di tingkat wilayah, tetapi juga memiliki PDRB per kapita yang paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dan perkebunan di kedua provinsi ini mampu menyerap tenaga kerja, namun memiliki nilai tambah relatif kecil. Secara lebih terperinci, perkembangan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi antara tahun 2006 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada Gambar 5.3.

GAMBAR 5.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi selama periode 2007—2009 cenderung menurun. Namun, kecuali Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan semua provinsi di wilayah Sulawesi masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional sebesar 14,2 persen. Gambaran secara lengkap persentase kemiskinan di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut.

TABEL 5.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2007—2009

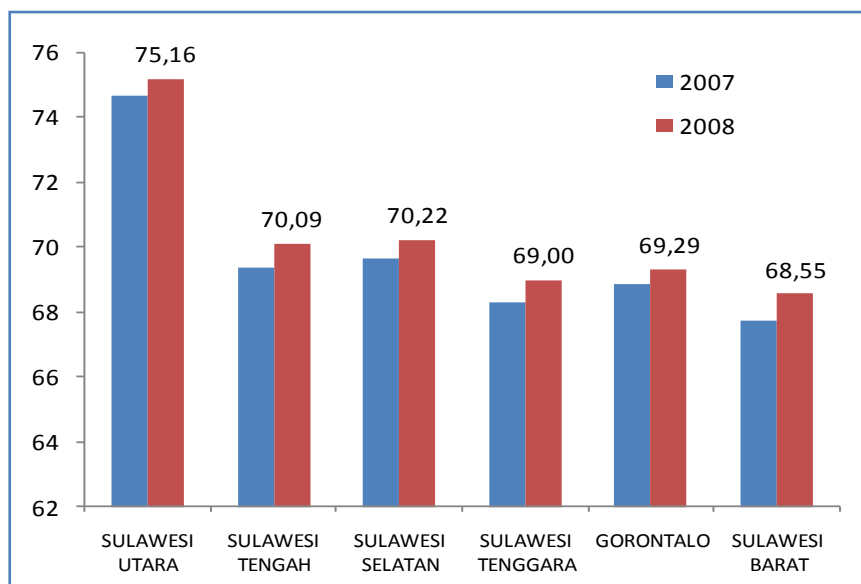
Provinsi	2007	2008	2009
Sulawesi Utara	11,4	10,1	9,8
Gorontalo	27,4	24,9	25,0
Sulawesi Tengah	22,4	20,8	19,0
Sulawesi Selatan	14,1	13,3	12,3
Sulawesi Tenggara	21,3	19,5	18,9
Sulawesi Barat	19,0	16,7	15,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2007—2008 menunjukkan

perbaiki untuk setiap provinsi di wilayah Sulawesi. Dari 6 (enam) provinsi yang ada di wilayah Sulawesi, hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dari nilai IPM nasional. Meskipun terdapat peningkatan nilai IPM dari tahun 2007 ke tahun 2008, hanya Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami peningkatan peringkat dari 28 menjadi 27. Secara nasional IPM Provinsi Sulawesi Utara berada pada peringkat ke-2, sementara provinsi lainnya berada di peringkat ke-20 ke bawah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah perdesaan dan pedalaman.

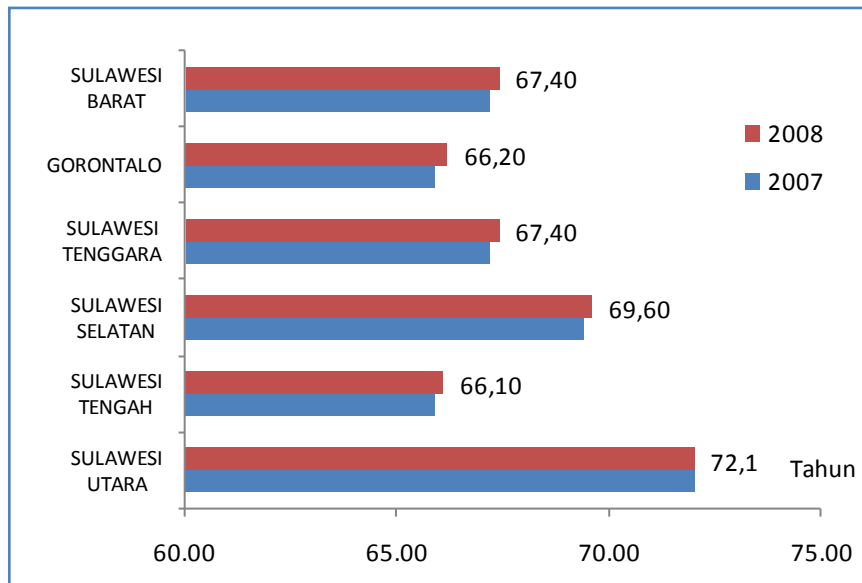
GAMBAR 5.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di bidang kesehatan, permasalahan akses pelayanan kesehatan tergambar dalam kesenjangan umur harapan hidup antarprovinsi, kondisi geografis wilayah, dan aksesibilitas kawasan perdesaan. Rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Utara memiliki harapan hidup selama 72 tahun lebih dan secara umum terjadi peningkatan umur harapan hidup hingga 2008. Namun, penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki harapan hidup 66 tahun. Perkembangan Umur Harapan Hidup antarprovinsi di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 5.5 sebagai berikut.

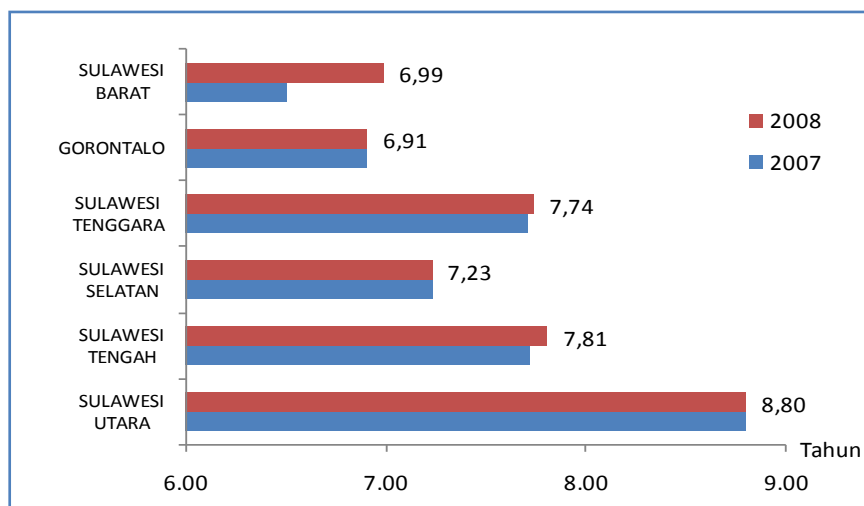
GAMBAR 5.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH SULAWESI TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata lama sekolah tahun 2008 tertinggi di Sulawesi Utara sebesar 8,8 tahun dan terendah di Gorontalo sebesar 6,91 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi dari aspek kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi, khususnya dalam akses memperoleh layanan pendidikan.

GAMBAR 5.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH SULAWESI TAHUN 2007—2008

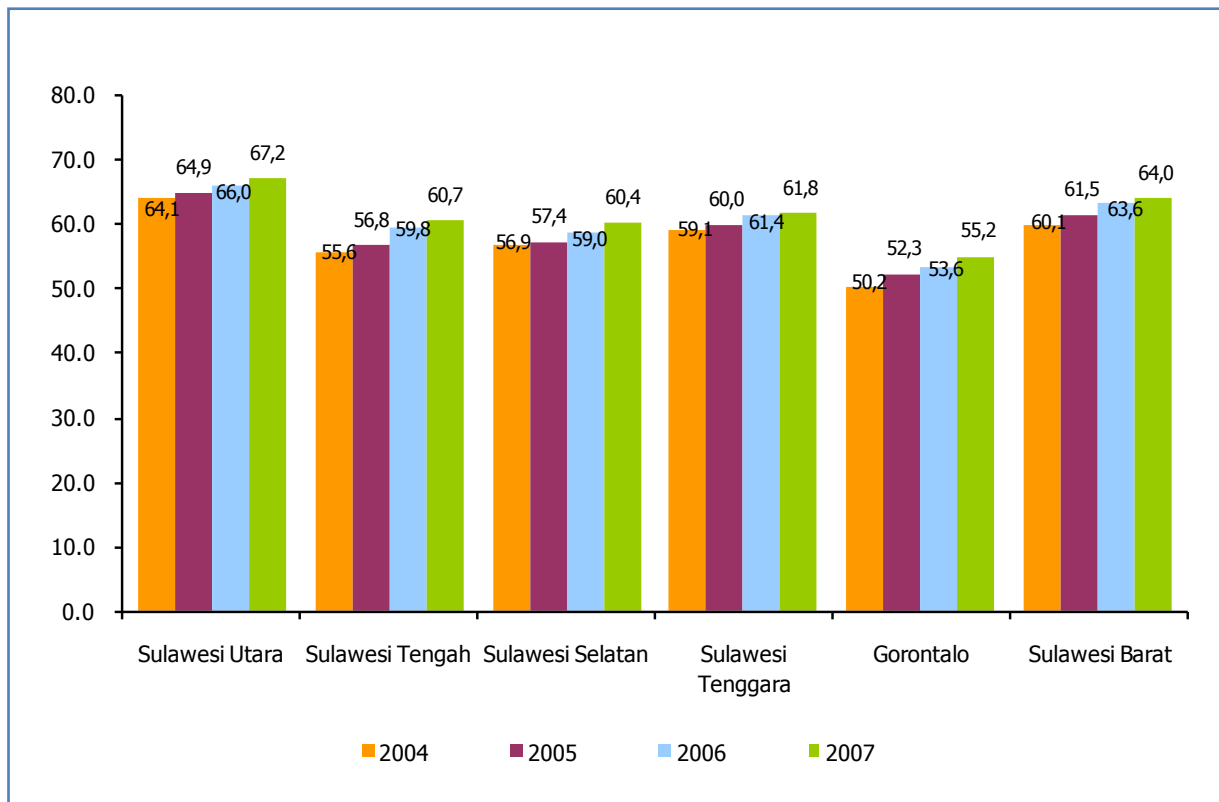


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Indeks pembangunan gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. Di wilayah Sulawesi, IPG tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara dari setiap provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2007. Peringkat sebesar 67,2, sementara nilai IPG di enam provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8. Nilai terendah berada di Provinsi Gorontalo sebesar 55,2, yang disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Sulawesi.

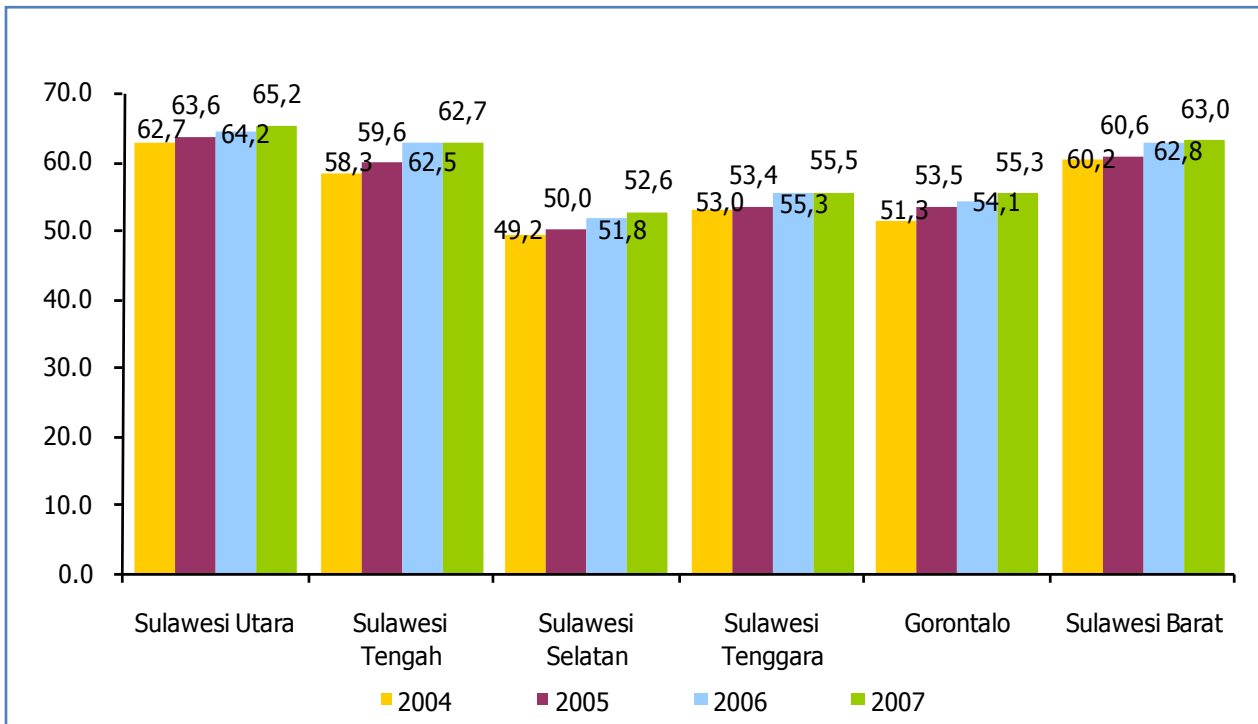
Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *gender empowerment measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Sulawesi, IDG tahun 2007 untuk masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006, dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat tertinggi dengan nilai 65,2, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat terendah dengan nilai 52,6. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, perlindungan perempuan dan anak terutama terhadap berbagai tindak kekerasan juga perlu ditingkatkan dalam lima tahun mendatang.

GAMBAR 5.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH SULAWESI TAHUN
2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah)

GAMBAR 5.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH SULAWESI TAHUN
2004-2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Wilayah Sulawesi menghadapi kendala sarana dan prasarana transportasi, antara lain belum meratanya ketersediaan prasarana, kurang memadainya mutu, dan lemahnya integrasi jaringan transportasi multimoda antarwilayah. Dengan letak geografis yang strategis, wilayah Sulawesi berpotensi menjadi hub jaringan transportasi laut antarnegara dan antarpulau dalam rangka mendukung perdagangan luar negeri. Jaringan pelabuhan Makassar, Bitung, Pantoloan, Kendari, Bau-bau, dan Anggrek berperan strategis dalam upaya peningkatan perdagangan, baik di wilayah Sulawesi maupun di kawasan Indonesia timur. Keterkaitan antarwilayah di Sulawesi juga menghadapi hambatan belum optimalnya integrasi jaringan jalan lintas serta belum terintegrasinya jalur penerbangan antarprovinsi.

Wilayah Sulawesi juga menghadapi terbatasnya ketersediaan energi listrik sebagai akibat rendahnya pasokan tenaga listrik. Keterbatasan ini menghambat upaya peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan. Saat ini pasokan energi listrik di wilayah Sulawesi berasal dari sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Sistem Suluttenggo) dan Sistem Kelistrikan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat (Sistem Sulserabar).



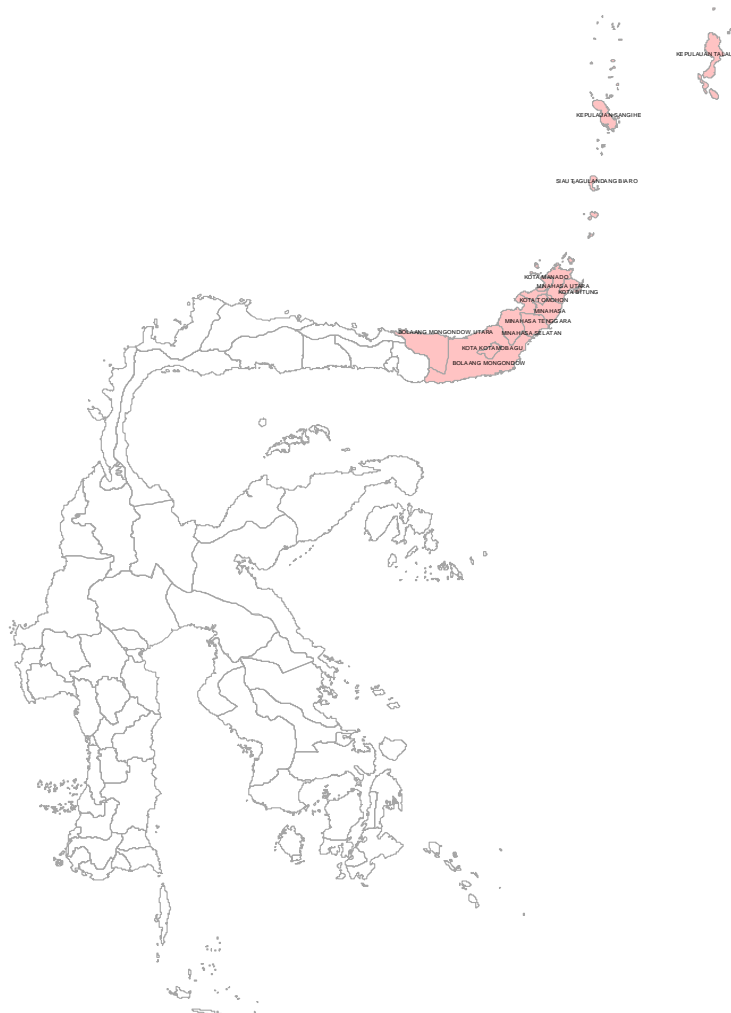
Rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk Provinsi Sulawesi Utara 66,6 persen, Sulawesi Tengah 47,6 persen, Gorontalo 48,7 persen, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 54,9 persen, serta Sulawesi Tenggara 38,2 persen.

Infrastruktur strategis lainnya adalah irigasi yang penting untuk mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Berdasarkan data tahun 2006, daerah irigasi wilayah Sulawesi sekitar 21 persen dari total daerah irigasi nasional yang tersebar di Sulawesi Selatan sekitar 69 persen, Sulawesi Tengah sekitar 16 persen, Sulawesi Tenggara sekitar 7 persen, Sulawesi Utara sekitar 6 persen, dan Gorontalo sekitar 2 persen.

Wilayah Sulawesi memiliki kekayaan sumber daya alam cukup tinggi berupa hutan, bahan tambang, lahan yang cocok untuk pertanian, serta sumber daya kelautan. Pemanfaatan lahan di wilayah Sulawesi sebagian besar untuk perkebunan. Penggunaan lahan sawah di wilayah Sulawesi seluas 830 ribu Ha, yaitu sekitar 66 persen di Sulawesi Selatan. Potensi bahan tambang meliputi nikel, emas, migas, dan batu gamping/kapur. Pemanfaatan sumber daya mineral pertambangan di Sulawesi sangat potensial bagi perkembangan ekonomi regional. Sementara itu, potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik yang dimiliki wilayah Sulawesi cukup beragam, yaitu mulai dari minyak bumi, batu bara, air (PLTA, minihidro, dan mikrohidro), dan panas bumi.

Kondisi wilayah Sulawesi dicirikan oleh topografi yang beragam. Sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara merupakan pesisir, sedangkan Sulawesi Barat berupa daerah perbukitan yang mencakup 52 persen desa. Wilayah berbukit dan bergunung umumnya memiliki karakteristik tidak stabil dan mudah longsor terutama akibat meningkatnya pembukaan hutan. Hal ini terlihat dari kejadian bencana alam dalam tiga tahun terakhir yang didominasi oleh bencana longsor dan angin puting beliung. Di samping itu, kerawanan bencana juga muncul dari aktivitas gunung berapi serta pertemuan subduksi lempeng Indoaustralia dan Eurasia yang memiliki potensi bencana gempa bumi diikuti tsunami.

GAMBAR 5.9
PETA KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH SULAWESI



Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Dalam hal pertahanan dan keamanan, wilayah Sulawesi bagian utara yang berdekatan dengan Filipina sangat rawan dengan tingginya konflik separtisme di Pulau Mindanao bagian Selatan. Risiko gangguan keamanan yang muncul adalah penyusupan jaringan sistemik teroris dan penyelundupan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya. Selain itu, wilayah Sulawesi juga pernah terjadi konflik horizontal. Permasalahan tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi mengingat upaya deteksi dan pencegahan dini secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan menghadapi tantangan terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan khususnya pelabuhan laut dan komunikasi, terutama di pulau-pulau terpencil. Perkembangan pascakonflik

menunjukkan tren pemulihan yang semakin kondusif dan masyarakat telah kembali beraktivitas secara normal. Tantangan ke depan adalah membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat, meningkatkan kemampuan institusi penegak keamanan dan ketertiban dan merevitalisasi modal sosial yang hidup di tengah masyarakat.

5.1.2 Isu strategis

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Sulawesi, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut.

1. **Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi.**

Dominasi sektor-sektor primer dalam perekonomian wilayah Sulawesi menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Padahal keragaman komoditas unggulan antardaerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan.

2. **Interkonektivitas domestik intrawilayah.**

Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian KBI dan KTI.

3. **Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan relatif tinggi ditemui di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

4. **Kapasitas energi listrik.**

Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi.

5. **Revitalisasi modal sosial.**

Peningkatan rasa saling percaya di antara masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Meningkatnya rasa saling percaya juga berperan memperlancar kerja sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif.

6. **Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil.**

Pengamanan kawasan perbatasan dengan negara Filipina sangat penting mengingat tingginya potensi konflik di bagian Mindanao selatan. Keterisolasian dan kesenjangan tingkat kesejahteraan di kawasan perbatasan juga berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat yang selanjutnya bisa mengancam kedaulatan wilayah nasional.

7. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Selanjutnya, meningkatnya investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

8. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi.

5.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi, pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) memprioritaskan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budi daya lainnya berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas keseluruhan Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan

masyarakat dan aset sosial-ekonominya, baik yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budi daya; (8) meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian daerah; (9) meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (10) memperluas pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; (11) meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan olahraga; (12) meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (13) meningkatkan kerja sama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga; (14) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; serta (15) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Sulawesi ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKN di Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado–Bitung sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya, (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, dan Kendari sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pengembangan PKW di Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota-kota Tomohon, Kotamobagu, Tondano, Isimu, Marisa, Kwandang, Luwuk, Pare-pare, Kolonodale, Palopo, Watampone, Bulukumba, Jeneponto, Pangkajene, Barru, Lasolo, Rarowatu, Raha, Baubau, dan Kolaka sebagai pusat pelayanan sekunder; (2) mengendalikan pengembangan kota-kota Mamuju, Poso, Buol, Donggala, Toli-Toli, Tondano, dan Unaha sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pengembangan PKL di Pulau Sulawesi diarahkan ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN. Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara diarahkan pada pengembangan kota Melonguane dan Tahuna.

5.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sulawesi, tujuan pembangunan wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2010—2014, adalah:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Sulawesi;
2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sulawesi;



3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara;
4. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);
5. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar;
6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian utara;
7. terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran;
8. meningkatkan peran wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional;
9. meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam;
10. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas wilayah Sulawesi.

Dengan demikian, sasaran pengembangan wilayah Sulawesi pada tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Sulawesi yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu : pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan perkapita.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sulawesi.
3. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
4. Meningkatnya jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon).
5. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar.
6. Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian utara.
7. Terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya.
8. Meningkatnya kontribusi wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional.
9. Meningkatnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana.

10. Mewujudkan kawasan lindung hingga mencapai luas minimal 40 persen dari luas wilayah Sulawesi.

TABEL 5.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Sulawesi Utara	5,7 – 6,3	7,1 – 7,8	9,17 – 8,86	3,05 – 3,02	9,9 – 11,0	8,2 – 9,0
Sulawesi Tengah	8,5 – 9,0	9,0 – 10,1	17,33 – 16,93	12,09 – 11,96	6,4 – 7,1	5,9 – 6,5
Sulawesi Selatan	6,2 – 7,2	7,5 – 8,3	11,28 -10,87	6,29 -6,04	6,8 – 7,6	4,7 – 5,2
Sulawesi Tenggara	7,5 – 7,9	8,0 – 8,5	17,95 – 17,49	14,14 – 14,01	3,7 – 4,1	2,1 – 2,3
Gorontalo	6,8 – 7,3	7,0 – 8,5	24,13 – 23,98	19,49 -18,56	4,6 – 5,0	2,9 – 3,2
Sulawesi Barat	5,8 – 6,5	6,2 – 7,0	14,06 – 13,93	10,03 - 9,99	4,1 – 4,5	2,7 – 3,0

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 5.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2010-2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Sulawesi Utara	12	9	8,96	9,12	74,47	75,42	7,190.51	7,739.39
Sulawesi Tengah	35	31	7,98	8,26	70,28	71,39	6,377.82	7,096.36
Sulawesi Selatan	28	24	8,00	8,80	69,33	70,80	6,102.59	6,938.13
Sulawesi Tenggara	30	25	7,90	8,20	70,28	71,39	5,126.63	5,641.86
Gorontalo	31	26	7,10	7,40	68,28	69,51	2,693.88	2,966.22
Sulawesi Barat	28	24	7,50	8,70	69,82	71,01	3,989.52	4,315.76

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

⁴⁾ Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

5.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arah pengembangan, tujuan dan sasaran, serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Sulawesi, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sulawesi kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan lumbung pangan nasional dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap;
2. Pengembangan gugus industri unggulan wilayah, dengan strategi:

- a. mengembangkan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan berbasis hasil laut;
 - b. mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari, dan Mamuju sebagai pusat industri pengolahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. mengembangkan metropolitan Maminasata sebagai pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan;
3. Pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan strategi memperkuat jalur wisata Toraja-Tomohon-Bunaken dengan Bali.
 4. Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik, dengan strategi:
 - a. mengembangkan integrasi sistem jaringan transportasi darat lintas Sulawesi;
 - b. meningkatkan intensitas perhubungan laut;
 - c. meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara.
 5. Pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia, dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan Makassar dan Bitung.
 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja;
 - b. memperluas jangkauan pelayanan kesehatan;
 - c. meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
 7. Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik;
 - b. diversifikasi sumber energi primer.
 8. Penguatan ketahanan dan harmonisasi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:
 - a. memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas agama, suku, ras, antara pemerintah-masyarakat.
 9. Pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dengan strategi:



- a. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan keterkaitan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan terdekat.
10. Penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik dengan strategi:
- a. meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi;
 - b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11. Peningkatan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana, dengan strategi:
- a. Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah.
 - b. Meningkatkan penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - c. Memperkuat mitigasi bencana.